

Budget Brief FITRA Riau

Pemerintah Membiarkan Kebakaran Hutan Tahunan

- **Minim Anggaran dan Program Tidak Jelas**

Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau terus terjadi setiap tahun, sehingga menimbulkan banyak kerugian baik materil maupun non materil. Hal itu terjadi bukan hanya kecerobohan masyarakat membakar lahan, juga disebabkan pemerintah yang tidak tanggap.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, menilai peristiwa tersebut terjadi setiap tahunnya, selain ulah dari pengusaha hutan dan perkebunan juga akibat dari pemerintah daerah yang tidak maksimal dalam melakukan pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Hal itu, melihat dari sisi anggaran APBD yang dialokasikan serta program – program yang di buat untuk penanggulangan kebakaran khususnya Pemerintah Provinsi Riau yang berada pada Dinas kehutanan Provinsi maupun yang dialokasikan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau.

Berikut Argumentasi FITRA Riau terkait lemahnya pemerintah daerah dalam penanganan bencana tahunan, berdasarkan alokasi anggaran pemerintah Provinsi Riau:

1. Minim Alokasi

Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya di provinsi Riau, tidak membuat pemerintah daerah sadar untuk memberikan perhatian lebih. Hal itu bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran yang ada dalam APBD untuk program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. APBD Provinsi Riau setiap tahun meningkat secara signifikan sejak tahun 2009 – 2013. Tercatat realisasi belanja tahun 2009 sebesar Rp. 3,7 triliun dan meningkat secara signifikan pada tahun 2013 sebesar Rp. 8,4 Triliun. Namun, peningkatan belanja daerah tersebut tidak berkontribusi besar terhadap alokasi anggaran pelestarian lingkungan. Sehingga wajar, kalau masalah kebakaran hutan saja di provinsi Riau terus berulang dan pemerintah daerah tidak mampu mengatasinya.

Meskipun setiap tahun dialokasikan anggaran program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di APBD Provinsi Riau, namun nilainya sangatlah minim. Tahun 2009-2013 di Dinas kehutanan Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. **6,065,625,000**, dengan realisasi (2009-2013) sebesar Rp. 3,916.006.050,-. Sedangkan di Badan Lingkungan Hidup provinsi Riau, tahun 2009-2013 dialokasikan sebesar Rp. **12,549,594,050.00** dan teralisasi sebesar **Rp. 7,866,929,140.00**.

Kalau dihitung secara persentase dengan jumlah APBD Riau selama 2009 - 2013 sebesar Rp. **28,642,594,737,572.80** maka, alokasi anggaran untuk bencana tahunan tersebut hanya 0,47 %. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Koordinasi, Sosialisasi, serta belanja barang (peralatan) untuk di Dinas Kehutanan.

Sedangkan untuk BLH anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, koordinasi, pelatihan dan pendidikan.

Anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan Dinas Kehutanan

No	Nama Kegiatan	2009	2010	2011	2012	2013
		Alokasi	Alokasi	Alokasi	Alokasi	Alokasi
1	Penanggulangan Kebakaran Hutan	500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	750,000,000	750,000,000
2	Pelatihan Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan	149,625,000	116,000,000		200,000,000	200,000,000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Regu Pemadam Kebarakaran	-	-	-	2,000,000,000	
	Total	649,625,000	1,016,000,000	500,000,000	2,950,000,000	950,000,000

Total Anggaran	6,065,625,000	(2009-2013)
Total Realisasi	3,916,006,050	(2009-2012)

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau

Nama Kegiatan	2009	2010	2011	2012	2013
	Alokasi	Alokasi	Alokasi	Alokasi	Alokasi
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	270,000,000	270,000,000		954,126,650	400,000,000
Peningkatan Kapasitas Pusdalkarhutla			350,000,000	274,252,000	
Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	296,000,000	296,000,000	150,000,000		1,300,000,000
Pengumpulan Data Riau Climate Center	366,375,000	673,815,400			
Identifikasi Kondisi Existing Kerukan Lingkungan Hidup Kawasan Hutan dan Non Hutan di Provinsi Riau		383,400,000			
Pengendalian Karhutla Berbasis masyarakat					500,000,000
Total	932,375,000.00	1,623,215,400.00	500,000,000.00	1,228,378,650.00	2,200,000,000.00
Anggaran (2009-2013)		6,483,969,050.00			
Realisasi (2009-2012)		3,950,923,090.00			

Sumber : FITRA Riau diolah dari Dokumen APBD Riau

Dengan semakin tingginya potensi kebakaran hutan di Riau yang terjadi setiap tahun, maka pemerintah daerah juga perlu menambahkan anggaran serta memberikan program – prpgram yang jelas. Sehingga bencana kebakaran hutan dapat ditanggulangi.

2. Program Rutinitas

Meski setiap tahun ada alokasi anggaran yang diperuntukkan terhadap kebakaran hutan di Riau, namun kebakaran hutan terus terjadi. Hal itu FITRA Riau menilai program – program yang dibuat oleh Pemerintah daerah hanya sebatas rutinitas, sedangkan ouput dari program-program yang dilaksanakan tidak jelas. Dengan demikian sangat wajar kebakaran hutan tidak mampu dikendalikan. Misalnya BLH setiap tahun ada anggaran yang dialokasikan untuk Koordinasi pengendalian kebakaran hutan, mulai dari Rp. 200 jt hingga Rp. 1 Miliar. Selanjutnya ada anggaran untuk sosialisasai pencegahan kebakaran hutan dengan nilai setiap tahunnya kurang lebih Rp. 300 juta. Namun hasil dari kegiatan tersebut tidak menurunkan angka kebakaran hutan setiap tahunnya. Al hasil tahun 2013 justru kebakaran hutan semakin meraja lela.

3. Hasil Hutan Dirampok Pegawai

Anggaran Dinas Kehutanan (2009-2013)

TAHUN	Jenis Belanja			
	Tidak Langsung		Langsung / Program	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2009	26,413,809,515.11	22,911,542,330.00	8,596,843,000.00	7,813,146,768.00
2010	25,702,318,784.00	20,556,623,858.00	13,041,152,400.00	10,802,335,854.00
2011	25,090,150,987.00	23,536,902,291.00	7,424,136,400.00	6,823,247,114.00
2012	26,336,080,564.00	26,336,080,564.00	23,386,036,485.00	14,698,163,445.00
2013	30,841,047,604.00	-	27,206,735,610.00	-
Total	134,383,407,454.11	93,341,149,043.00	79,654,903,895.00	40,136,893,181.00

Sumber : FITRA Riau diolah dari Dokumen APBD 2009-2013

Hasil kekayaan hutan yang diperoleh provinsi Riau dalam bentuk (PSDH), yang seharusnya dikembalikan sebagai bentuk pelestarian lingkungan, namun justru habis dirampok sebagai belanja pegawai (gaji). Sementara alokasi program kegiatan di beberapa badan yang berhubungan dengan lingkungan sangat sedikit. Lihat saja di Provinsi Riau pada Dinas Kehutanan, dari tahun 2009-2013 alokasi anggaran yang disediakan rata-rata 63% diperuntukkan membayar gaji pegawai. Sementara kegiatan lingkungan hanya dialokasikan sebesar 37%. Sedangkan yang terealisasi anggaran kurun waktu (2009-2012) untuk pelanja pegawai sebesar Rp. 70%, sedangkan realisasi program dan kegiatan hanya 30%.

Sementara program-program yang dibuat oleh Dinas Kehutanan lebih didominasi untuk belanja aparatur pemerintah (Perjalanan Dinas, Kapasitas Aparatur, Mobil dan Peralatan Kantor dan lain-lain yang berhubungan dengan belanja aparatur). Sedangkan untuk program kegiatan yang di peruntukkan pelestarian lingkungan masyarakat penerima dampak eksploitasi sangatlah tidak masuk akal. Itupun dalam bentuk pelatihan, penanaman pohon rutin, dan rapat koordinasi antar daerah. Sedangkan hasil hutan yang menjadi PNBP Provinsi Riau yang bersumber dari Hutan tidak cukup untuk membiayai gaji pegawai beserta perlengkapannya. Lihat table berikut.

Tabel: PSDH Bagian Provinsi Riau

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2008	14,865,342,528.00
2	2009	18,861,261,064.00
3	2010	26,901,909,467.00
4	2011	23,160,113,844.00
5	2012	27,896,114,382.00

Dengan demikian FITRA RIAU menarik kesimpulan bahwa, ditinjau dari kebijakan keuangan daerah Pemerintah daerah tidak memberikan perhatian serius terhadap kelestarian lingkungan hutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya pemerintah daerah justru jor-joran membiarkan eksploitasi hutan untuk dijadikan lading **RAMPOKAN**.

Triono Hadi
Peneliti FITRA Prov. Riau